

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pertama, kelahiran Partai Rakyat Demokratik tidak bisa dilepaskan dari aktivitas gerakan mahasiswa pada akhir 1980-an dan keterbukaan politik yang mulai dirasakan awal 1990. Partai Rakyat Demokratik membuktikan diri bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan sosial dan politik secara sadar untuk meningkatkan kapasitas organisasi menjadi partai politik. PRD juga dapat memanfaatkan kondisi politik yang relatif kondusif untuk menciptakan gerakan-gerakan massa pada periode 1994-1996. Barangkali, kelahiran PRD adalah sebuah keniscayaan mengingat pada waktu yang relatif bersamaan dan berdekatan di dunia sedang terjadi tren “gelombang demokratisasi ketiga”. Filipina, Korea Selatan, Pakistan menjadi beberapa negara yang sedang mengalami masa transisi ke arah demokrasi.

Kedua, PRD tentunya dapat memanfaatkan hal tersebut untuk membangun aksi-aksi kolektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi sosial politik dalam negeri. Dari awal pendiriannya, PRD selalu mengeluarkan program-program politik yang berkonfrontasi langsung dengan pemerintah, seperti cabut dwi fungsi ABRI, cabut 5 UU Politik, Referendum Timor-Timur dan lain-lain. Beberapa tuntutan seperti cabut UU Politik sebelumnya pernah disuarakan oleh Petisi 50, namun PRD merasa bahwa Petisi 50 tidak melakukan aksi-aksi kolektif dan berkonfrontasi langsung dengan rezim Orde Baru.

Program-program politik PRD yang radikal pada masa itu, tidak terlepas dari pengaruh pemahaman ideologi yang menjadi sumber prilaku dan berpikir para aktivis partai tersebut. Kajian mengenai teori-teori kiri tentunya menambah wawasan dalam menganalisa kebijakan politik rezim Orde Baru. Selain itu, wacana kiri juga terlihat dari strategi yang digunakan oleh PRD yaitu dengan mobilisasi massa sebanyak-banyaknya untuk menandingi kekuatan pemerintah.

Program politik PRD juga diarahkan untuk membentuk sentimen terhadap rezim Orde Baru, PRD beranggapan bahwa hal yang pertama harus dibenahi adalah meruntuhkan rezim Orde Baru hingga ke akar-akarnya, kemudian membangun

Indonesia dengan platform yang lebih demokratis. Sebagai upaya meluaskan sentimen terhadap Orde Baru maka PRD membentuk organisasi-organisasi lintas sektoral pada basis terkecil, dan kemudian membangun front nasional, koalisi antar organisasi pro-demokrasi, koalisi dengan elite politik, dan melakukan intervensi dalam tubuh PDI dan Mega-Bintang-Rakyat. PRD membangun struktur perlawanan dalam empat sektor di wilayah perkotaan, yaitu kaum miskin kota, buruh, mahasiswa dan pendukung Megawati. Hal ini dapat dipahami mengingat pada periode tersebut struktur perlawanan dipersiapkan untuk melakukan aksi kolektif dalam momen Pemilu 1997, dan Sidang Umum MPR 1998. Dalam hal ini, PRD berhasil membangun sentimen terhadap rezim Orde Baru dan menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai bobroknya pemerintahan Soeharto. Puncaknya adalah peristiwa Reformasi 1998 sebagai mosi tidak percaya masyarakat kepada pemerintahan Soeharto.

Dalam membangun sentimen terhadap Orde Baru, PRD juga harus berhadapan langsung dengan kekuatan represif pemerintah tersebut. Tercatat, dalam periode 1996-1998 usaha PRD membangun sentimen dan gerakan terhadap Orde Baru coba digagalkan pemerintah, pertama pasca peristiwa 27 Juli 1996 dengan menangkap para pimpinan PRD dan menuduh PRD sebagai dalang dibalik peristiwa kerusuhan tersebut. Kedua, menjelang SU MPR 1998 belasan aktivis PRD ditangkap dan diculik oleh pemerintah bahkan beberapa hilang dan tak kembali hingga kini. Namun, senada dengan teori pegas bahwa semakin di tekan maka semakin kuat daya pegas suatu benda. Maka, aksi-aksi represif rezim Orde Baru tersebut pun tidak menghentikan gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, justru melahirkan perlawanan yang lebih besar dan luas.

Setelah reformasi 1998, beberapa tuntutan yang telah dikampanyekan PRD sejak 1994 menjadi sebuah kenyataan. 5 Paket UU Politik yang membatasi kebebasan masyarakat untuk berbicara dan berpolitik dicabut, begitupun dengan dwifungsi ABRI yang memberikan peran sosial politik terhadap militer. Selain itu, pemerintah juga segera melakukan Referendum di Timor-Timur sesuai dengan tuntutan PRD. Namun, dalam hal lain proses penggantian kekuasaan tidak dibarengi dengan berpindahnya kekuasaan ke tangan rakyat, sehingga beberapa tuntutan Reformasi tidak dilaksanakan secara maksimal.

Ketiga, keikutsertaan PRD dalam pemilu tidak bisa dimaknai secara tunggal bahwa PRD menginginkan suara dan menempatkan kader mereka dalam parlemen. Karena, PRD sendiri mengklaim bahwa tujuan utama mereka adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk memperjuangkan reformasi total. Langkah PRD tersebut dapat ditafsirkan bahwa PRD tidak mau kehilangan momen pemilu sebagai wahana kampanye politik, namun juga tidak kehilangan idealisme partai yang sejak dulu menyuarakan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Sifat dualisme PRD tercermin dalam wacana “Coblos PRD atau Boikot Pemilu!”.

Kegagalan PRD dalam Pemilu 1999 adalah jelas karena partai ini didesain sebagai partai ideologis dan partai massa, bukan sebagai partai elektoral yang didesain dapat meraup suara dalam pemilu. Sebagai partai ideologis yang mengusung Sosial Demokrasi Kerakyatan sebagai asasnya, PRD terjebak dalam ceruk pemilih yang terbatas. Meskipun, PRD tidak menerapkan inklusifitas dalam segmen politiknya, dan cenderung lebih terbuka terhadap berbagai segmen pemilihnya. Namun, pada realitanya ceruk pemilih PRD datang dari masyarakat yang memiliki pandangan-pandangan revolusioner dan jumlahnya pun terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini penulis hendak menyampaikan beberapa saran, yaitu :

Pertama, kajian mengenai kehidupan sosial politik Indonesia pada masa transisi pemerintahan Orde Baru menuju Reformasi perlu terus dikembangkan dan mendapat perhatian dari para peminat sejarah dan politik dalam rangka memperkaya khazanah intelektual di negeri ini. Kajian mengenai kehidupan sosial politik pada masa tersebut akan mengantarkan kita terhadap wawasan kebangsaan yang terbuka, dan sekaligus menjadikan cerminan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam rangka pengembangan materi atau bahan ajar pada mata pelajaran Sejarah Indonesia tingkat SMA Kelas XII Kompetensi Dasar 3.5 hingga 3.7 mengenai Kehidupan Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi untuk mengembangkan kajian dalam skripsi ini. Beberapa topik masih terbuka untuk kemudian dikembangkan menjadi penelitian berikutnya, diantaranya adalah :

- a. Kajian pemikiran politik para aktor pro-demokrasi baik perseorangan maupun kelompok mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya pasca Reformasi.
- b. Kajian mengenai kiprah Partai Rakyat Demokratik pada masa Reformasi hingga kini.
- c. Hubungan elite-elite politik baik dari kalangan ABRI maupun sipil dalam pemerintahan rezim Orde Baru yang mulai memburuk sejak akhir tahun 80an. ;
- d. Gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, khususnya petani dan buruh pada akhir tahun 80an sebagai embrio dari gerakan Reformasi 1998.
- e. Peristiwa 27 Juli 1996 dan dampak politiknya terhadap popularitas Megawati yang melahirkan persekutuan Mega-Bintang pada Pemilu 1997 sebagai upaya untuk menandingi dominasi Golongan Karya.

Beberapa topik diatas perlu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang komperhensif dan holistik mengenai awal Indonesia memasuki keterbukaan politik yang menjadi akar bagi munculnya gerakan Reformasi 1998, dan diharapkan kajian mengenai topik tersebut dapat memberikan referensi solusi terhadap permasalahan kontemporer negeri ini.